

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2023



msun medal



DHARMA WANITA PERSATUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Mayor Abdurrahman No. 200 Telp. (0261) 201463
Sumedang 45322

DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

**Jln. Mayor Abdurrahman No. 200 Telp. (0261) 201 463
SUMEDANG – 45322**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah selesai kami susun. Penyusunan LAKIP Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selama kurun waktu satu tahun. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang didalamnya meliputi Visi dan Misi Dinas, arah kebijakan umum dan strategi kegiatan, serta program pembangunan yang dilaksanakan di SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 2023 tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan Daerah, kondisi lingkungan eksternal, serta evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, sehingga diharapkan implementasi program pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat lebih berdaya guna, terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua.

Sumedang, Desember 2023

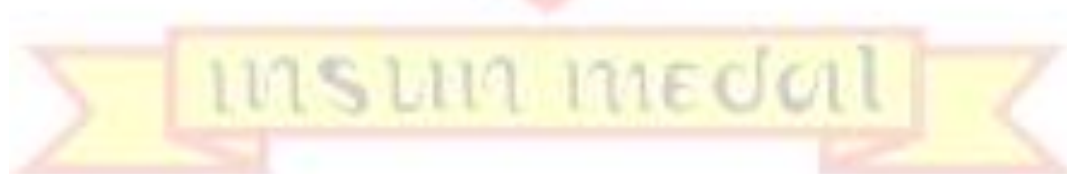
Penyusun,

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis	6
1.5. Uraian Singkat Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	15
3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023..	17
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	20
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
3.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif/Solusi yang telah dilakuman	23
3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2023	27
3.7. Dokumentasi Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Perbaikan Kedepan	47

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 : Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial	6
Tabel 2.1. : Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	10
Tabel 2.2. : Strategi dan Arah Kebijakan	12
Tabel 2.3 : Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.4. : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	14
Tabel 3.1. : Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel 3.2. : Target Penilaian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.3. : Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	17
Tabel 3.4. : Target dan Realisasi PPKS tahun 2023	18
Tabel 3.5. : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	20
Tabel 3.6. : Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023	22
Tabel 3.7. : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja IKU Dinas Sosial kabupaten Sumedang Tahun 2023	22
Tabel 3.8 : Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif/Solusi yang Telah dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.9 : Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif/Solusi yang telah Dilakukan dalam Pelaksanaan Program	24
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Tahun 2023	27



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1.3.1. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.



1.3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

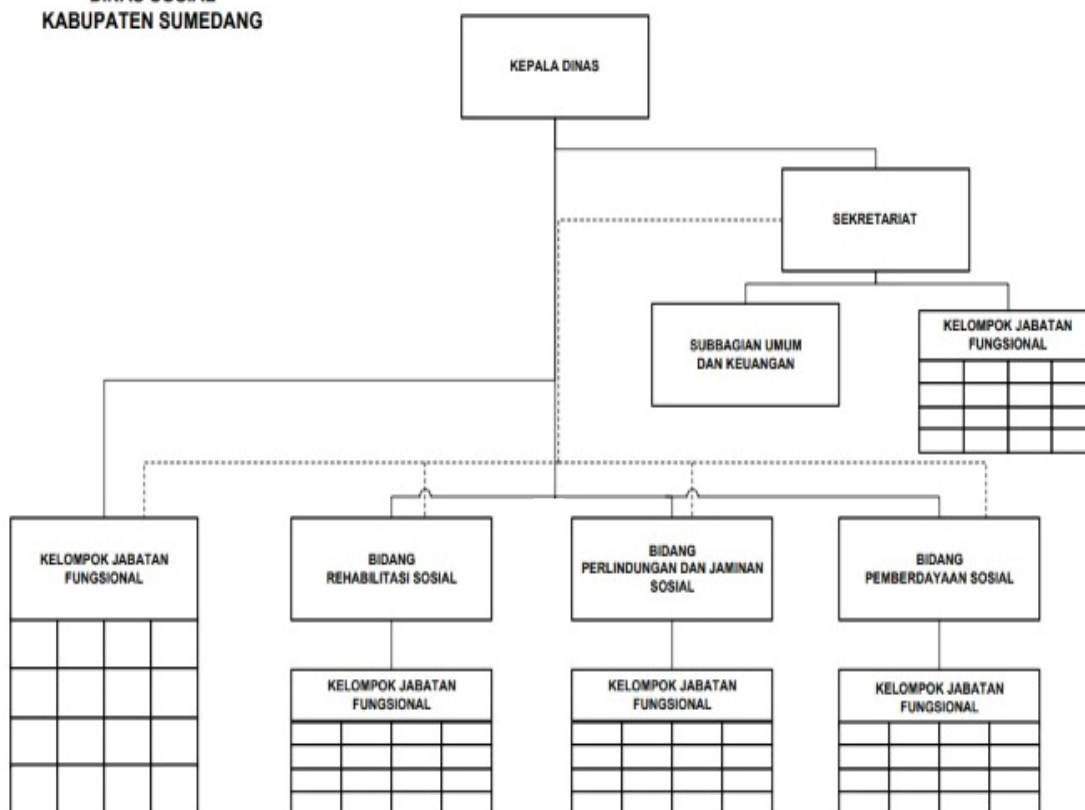
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini :

Gambar. 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG**



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Sosial yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2019-2023.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial

No	Urusan	Permasalahan
1.	SOSIAL	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum Update
		Penerima Manfaat bantuan sosial masih ada yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten
		Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesiap siagaan bencana alam



No	Urusan	Permasalahan
		Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal
		Masih kurangnya pelestarian akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang harus berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Sumedang memiliki manfaat antara lain untuk:



1. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.

Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-1 yaitu **Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat**. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah SAKIP Perangkat Daerah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;
4. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana;
5. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
6. Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan

mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;	Penerbitan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2.	Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal;
3.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
4.	Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5.	Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
6.	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		SAKIP Perangkat Daerah	

2.2 Perjanjian Kinerja

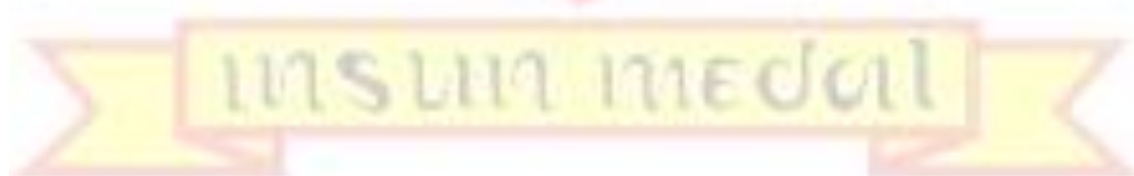
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		75	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	1,527.995.940	APBD
					Program Rehabilitasi Sosial	3,055.415,600	APBD
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.741.797.220	APBD
					Program Penanganan Bencana	761.129.090	APBD
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.842.820	APBD
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,86	Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.927.994.463	APBD
		SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori			



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	75
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,86
	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2023.

3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	75	60,57	80,76	-
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30.86	-	-	-
	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	A	100	Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja		Persen			-	



Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja untuk urusan sosial sebagaimana tersirat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-5 perencanaan (tahun 2023) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 99.89% dari target yang dicanangkan sebesar 75% sehingga capaian kerjanya sebesar 133.19%. Dalam artian pada Triwulan IV tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 75% dari jumlah PPKS yaitu sebesar 42,836 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 57,055 orang. Berikut di sajikan Target dan realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PPKS tahun 2023

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	%
	Jumlah PPKS	Orang	57,115	57,055	99.89
1	Anak Bayi terlantar	Orang	1	1	100
2	Anak terlantar	Orang	224	224	100
3	Anak yang berhadapan dengan hokum	Orang	30	30	100
4	Anak jalanan	Orang	1	1	100
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	Orang	15	8	53.33
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Orang	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	Orang	464	464	100
9	Penyandang disabilitas	Orang	318	318	100
10	Tuna susila	Orang	10	3	30

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	%
11	Gelandangan	Orang	5	5	100
12	Pengemis	Orang	3	3	100
13	Pemulung	Orang	3	3	100
14	Kelompok minoritas	Kelompok	7	3	42.86
15	Bekas warga binaan lembaga pemasayarakatan	Orang	1	1	100
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	Orang	68	26	38
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	Orang	1	1	100
18	Korban trafficking	Orang	3	3	100
19	Korban tindak kekerasan	Orang	-	-	-
20	Pekerja migran bermasalah ocial (PMBS)	Orang	1	1	100
21	Korban Bencana Alam	Orang	1378	1378	100
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	-	-	-
24	Fakir miskin	Orang	54,562	54,562	100
25	Keluarga bermasalah ocial psikologis	Orang	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok	20	20	100

Sumber : Data diolah Tahun 2023

2. Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah memiliki indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran ini memiliki target kinerja pada tahun 2023 sebesar 30,86% dan belum dilakukan penilaian kinerja.

2. SAKIP Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran ini memiliki target kinerja pada tahun 2023 impelementasi Tahun 2022 dengan kategori A diperoleh realisasi A atau sebesar



100 persen. Sedangkan untuk implementasi pelaksanaan tahun 2023 yang akan dilakukan penilaian pada tahun 2024 dan belum dilakukan penilaian kinerja.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 133.19%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 132,81%. Terjadi kenaikan kinerja sebesar 0.38%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

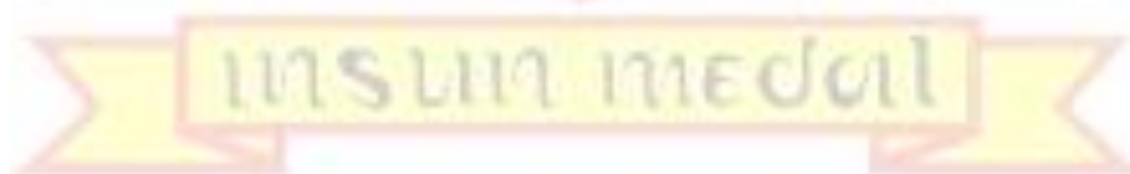
Realisasi Kinerja Tahun 2019 s.d 2021

No	IKU	Kondisi Awal	Satuan	Target Dan Capaian IKU						Tingkat Capaian
				2019		2020		2021		
				Target RPJMD	Capaian	Target RPJMD	Capaian	Target RPJMD	Capaian	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10.05	Persen	9.25	9.11	8.45	8.1	7.65	7.91	89.17
2	Nilai Sakip Daerah	BB	Skor	B	B	BB	BB	A	A	100
3	Tingkat Penyerapan Anggaran	94.53	Persen	95	94.28	95	60.61	95	97	102.10
4	Jumlah Inovasi SKPD	N/A	Inovasi	1	1	2	3	3	3	100
5	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	56.05	Persen	65	23.5	70	30.6	75	80.11	106.81



Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d 2023

Tahun 2022							Tahun 2023						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	65	86,33	132,81	Sangat Tinggi	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	75	99,89	133,19	Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100	Sangat Tinggi	A	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	30,86	-	-	Belum Ada Penilaian
	SAKIP Perangkat Daerah	95	97	102,10	Sangat Tinggi	95		SAKIP Perangkat Daerah					
	SAKIP Perangkat Daerah	Persen	A	A	100	Tinggi							



3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 18.084.1735.133- yang terdiri dari 6 program. 41 Sub Kegiatan Sedangkan realisasinya sebesar Rp.16.665.121.443 atau 92.15%.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.907.994.463,	5.649.173.964	95,30
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.527.995.940	1.508.552.040	98,73
3	Program Rehabilitasi Sosial	3.055.415.600	3,040.189.881	99.50
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.741.797.220	5.661.246.700	83,97
5	Program Penanganan Bencana	761.129.090	723.796.038	95,10
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.842.820	82.162.820	91,45

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja IKU
Dinas Sosial kabupaten Sumedang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	133.19	92.15	41.04	Efisien
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-
	SAKIP Perangkat Daerah	80 – 90	95.62	5.62	Efisien

3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif/Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

FAKTOR PENDORONG KETERCAPAIAN TARGET	FAKTOR KEGAGALAN	SOLUSI/ALTERNATIF
Faktor Internal:	Faktor Internal:	
1. Optimalnya pelayanan Rumah Besar Simpati/Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Puskesmas ditingkat Desa/Kelurahan	Verifikasi Data Fakir Miskin dari Tingkat Desa belum sesuai aturan dan ketentuan	Dilakukan Verifikasi Ulang Data Fakir Miskin ditingkat Desa
2. Koordinasi, kolaborasi, pentahelik dan cascading dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pekerja Sosial yang Profesional	Dilakukan usulan penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pekerja Sosial, serta dilakukan Pembinaan, Bimtek/Diklat atau Sertifikasi SDM
3. Proses Perencanaan, pelaksanaan dan monev sesuai yang direncanakan	Sarana dan Prasarana kendaraan operasional dalam penanganan PPKS belum memadai	Melakukan usulan pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan operasional yang memadai
Faktor Eksternal :	Faktor Eksternal :	
1. Adanya Program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat seperti Kepesertaan PBI, PKH, Bantuan Sembako, Permakanan Lansia dan disabilitas serta bantuan Atensi	Kapasitas dan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Optimal	Pembinaan, Bimtek/Diklat atau Sertifikasi SDM
2. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan provinsi dalam proses rujukan, atensi, bimbingan fisik mental spritual dan sosial dalam penanganan PPKS	Peran Kelembagaan Sosial belum Optimal	Dilakukan Penguatan Kelembagaan Sosial dengan Pembinaan dan sosialisasi
3. Crosscutting dengan Perangkat Daerah Lainnya dalam Penanganan PPKS	-	-

Tabel 3.9
Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam Pelaksanaan Program

No	Unit Kerja	Program	Keberhasilan	Kegagalan	Alternatif/Solusi
1	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>Terpasilitasinya kebutuhan dasar masyarakat miskin/tidak mampu melalui program sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program PKH sebanyak 54.562 Keluarga Penerima mamfaat (KPM) 2. Program sembako sebanyak 145.211 KPM 3. Program PBI sebanyak 110.578 Jiwa 4. Program KUBE sebanyak 56 Kelompok (560 KK) 	<p>Masih terdapat sasaran yang tidak terpasilitasi bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan ketidaksesuaian nomer nik dan kk (Adminuk tidak akurat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Program tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan stanting 2. Dilakukan sinkronisasi dengan Update Data setiap bulan dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS). Adapun Update Data meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemadanan Dukcapil b. Ganti Pengurus Bansos c. Perbaikan Data bansos d. Perbaikan Data Anomali e. Usulan Penerima Bansos dan PBI serta Penonaktifan Penerima Bansos bagi yang sudah tidak Layak
		Program Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban yang terdampak bencana: <ol style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya penyediaan tempat penampungan pengungsi b. Terpenuhinya Penyediaan Permakanan c. Terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban bencana belum akurat 2. Keterbatasan anggaran untuk dukungan operasional bagi relawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah/Camat lokasi terdampak 2. Koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 3. Pengusulan anggaran untuk biaya pengerahan relawan pada kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

No	Unit Kerja	Program	Keberhasilan	Kegagalan	Alternatif/Solusi
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Terjalannya Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan mitra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	1. Banyak Data CPCL kurang akurat.	Dilakukan Verifikasi dan Validasi Data serta Data harus update Serta dilakukan terus Koordinasi dan Konsultasi
			2. Dalam Pemenuhan Bantuan Kebutuhan Dasar bagi PPKS memperoleh dukungan bantuan dari APBN (Atensi dari STIES) dan APBD Provinsi	2. Calon Penerima Bantuan ada sebagian kurang tepat Sasaran.	
				3. Penerbitan nomor Kepbup sering terlambat atau telat keluarnya.	Dilaksanakan Sosialisasi tentang bentuk Surat Pengajuan Permohonan Bantuan
				Surat Permohonan Bantuan dari Desa atau Kelurahan Data Calon Penerimaanya identitasnya kurang lengkap dan Kebutuhannya tidak disampaikan atau tidak diberitahukan.	
			Dalam melaporkan laporan Pertanggungjawaban masih banyak yang kurang lengkap terutama dalam Dokumentasi dan Nota/Kwitansi Pembelian Sembako	Dilaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Bansos Uang Permakanan	
			Sulitnya mendapatkan Data BNBA karena kurang koordinasi di Tingkat Desa/TKSK dan data kurang UP Date	Meningkatkan koordinasi sampai ke tingkat bawah. Update data dengan Desa melalui verfal data	
			Kekurangan Sumber Daya Manusia Peksos dalam Penanggulangan ABH	Usulan SDM Peksos	
3.		Program Pemberdayaan Sosial	1. Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat meningkat dengan melakukan : a. Penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 270 desa dan 7 kelurahan b. Kapasitas Sumber	1. Kapasitas dan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Optimal 2. Peran Kelembagaan Sosial belum Optimal	1. Penguatan Puskesos menjadi 4 tingkatan : a. Tumbuh b. Berkembang c. Maju d. Mandiri 2. Sertifikasi SDM Pengelola LK3

No	Unit Kerja	Program	Keberhasilan	Kegagalan	Alternatif/Solusi
			<p>Daya Manusia (SDM) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) meningkat</p>		
			<p>2. Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meningkat dan aktif dalam menangani masalah kesejahteraan sosial</p>		<p>Menyelenggarakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas PSM : <ol style="list-style-type: none"> a. Studi Tiru ke Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam penanganan PPKS b. Bimtek penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi PSM 2. Peningkatan Kapasitas TKSK melalui bimtek penanganan masalah kesejahteraan sosial
			<p>3. Pendampingan Komunitas Adat Terpencil meningkat</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan Kajian Awal Komunitas Adat Terpencil melalui Instrumen : <ol style="list-style-type: none"> a. Kategori 1 b. Kategori 2 c. Kategori 3 d. Kategori Umum Berdasarkan Permensos RI no 9 Tahun 2012
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Forkopimda, Kodim, Polres, Kejaksaan dan Kemenhumkam dan KORPRI 2. Dilakukan Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya Pencurian Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di Taman Makam Pahlawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan lebih diperketat 2. Diusulkan Penambahan Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan 1 x 24 jam

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 92,15%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
	Dinas Sosial									
1.06.0.00.00.00.5.	Belanja Daerah									
1.06.1.06.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.907.994.463		5.649.173.964		95,62	
1.06.1.06.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	Laporan	109.554.360	23,00	93.924.360	121,05	85,73	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	37.730.820	7	28.880.820	100,00	76,54	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	9.271.340	1	9.241.340	100	99,68	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.380.990	1	6.280.990	100	98,43	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.001.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.675.010	1	4.575.010	100,00	97,86	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dokumen	5.815.450	1	5.715.450	100	98,28	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	Laporan	45.680.750	12	39.230.750	100	85,88	
1.06.1.06.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Laporan	4.037.524.443	12	3.813.624.838	100,00	94,45	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang	4.020.390.933	28	3.796.491.728	100	94,43	
1.06.1.06.0.001.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7.953.310	12	7.953.310	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9.180.200	12	9.179.800	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	30.718.800	9,00	30.718.800	75	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	Dokumen	30.718.800	10	30.718.800	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Laporan	450.172.470	12,00	450.163.555	100	100,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	72.089.270	1,00	72.089.270	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	80.160.000	12	80.160.000	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	45.963.200	12	45.963.200	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	Dokumen	9.624.000	12	9.624.000	120	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	201.336.000	12	201.327.085	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	41.000.000	12	41.000.000	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	247.000.410	12,00	237.527.590	100	96,16	
1.06.1.06.0.001.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	Unit	133.308.970	4	129.569.700	100	97,20	
1.06.1.06.0.001.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Laporan	113.691.440	12	107.957.890	100	94,96	
1.06.1.06.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	532.973.980	12	524.714.613	100	98,45	
1.06.1.06.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	12	Laporan	46.873.980	12	41.776.613	100	89,13	

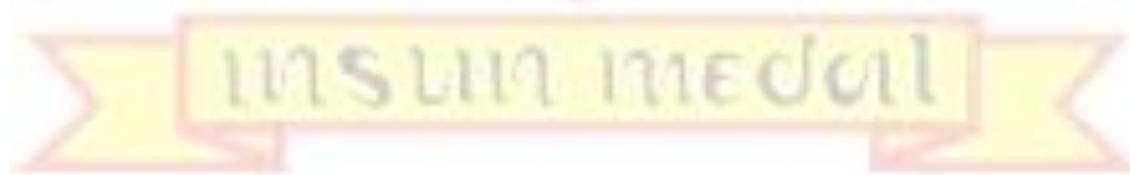
KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.001.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	14.140.000	12	14.140.000	100	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.08.04.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor	12	Laporan	471.960.000	12	468.798.000	100	99,33	
1.06.1.06.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	500.050.000	12	498.500.208	100	99,69	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30	Unit	262.122.000	30	261.286.800	100	99,68	
1.06.1.06.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	237.928.000	2	237.213.408	100	99,70	
URUSAN SOSIAL					12.176.180.670		11.015.947.479		90,47	
1.06.1.06.0.002.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	16,25	Persen	35.000.000	16,25	34.025.000	100	97,21	
1.06.1.06.0.002.2.01.		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	58,33	Persen	1.492.995.940	58,33	1.474.527.040	100	98,76	
1.06.1.06.0.002.2.01.02.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	20	Kelompok	35.000.000	20	34.025.000	100	97,21	
1.06.1.06.0.002.2.03.	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Keluarga	35.000.000	200	34.025.000	100	97,21	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.002.2.03.01.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	7	Jenis	1.492.995.940	7	1.474.527.040	100	98,76	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	277	Orang	109.950.000	277	108.039.000	100	98,26	
1.06.1.06.0.002.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26	Orang	49.591.440	26	44.541.440	100	89,82	
1.06.1.06.0.004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	277	Lembaga	1.333.454.500	277	1.321.946.600	100	99,14	
1.06.1.06.0.004.2.01.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	35,75	Persen	3.055.415.600	37	3.040.189.881	103,48	99,50	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	16007	Orang	2.594.010.300	16557	2.583.188.320	103,44	99,58	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Perumahan	16007	Orang	2.190.049.980	16007	2.181.399.500	100	99,61	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.004.2.01.03.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang	100	Orang	54.413.370	100	54.413.370	100	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	450	Orang	256.873.500	450	254.743.500	100	99,17	
1.06.1.06.0.004.2.02. 1.06.1.06.0.004.2.02.01.	Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	100 150	Persen Orang	92.673.450	100 150	92.631.950	100 100	100 99,96	
1.06.1.06.0.004.2.02.07.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	30	Orang	461.405.300	30,00	457.001.561	100	99,05	
1.06.1.06.0.004.2.02.08.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.448	Orang	376.430.500	4.448	375.776.761	100	99,83	
1.06.1.06.0.005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	35.000.000	30	33.600.000	100	96,00	
1.06.1.06.0.005.2.02.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30	Orang	49.974.800	30	47.624.800	100	95,30	
1.06.1.06.0.005.2.02.02.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98	Persen	6.741.797.220	98,00	5.661.246.700	100	83,97	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.005.2.02.03.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	5	Dokumen	6.741.797.220	5	5.661.246.700	100	83,97	
1.06.1.06.0.005.2.02.04.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	145.211	Keluarga	209.100.000	145.211	205.440.200	100	98,25	
1.06.1.06.0.006.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	54.562	Keluarga	5.708.697.220	54.562	4.647.934.900	100	81,42	
1.06.1.06.0.006.2.01.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	460	Orang	824.000.000	460	807.871.600	100	98,04	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	100	Persen	761.129.090	100,00	723.796.038	100	95,10	
1.06.1.06.0.006.2.02.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100	persen	358.568.950	100	326.402.150	100	91,03	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan	400	orang	358.568.950	400,00	326.402.150	100	91,03	
1.06.1.06.0.007.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6	Kali	402.560.140	6	397.393.888	100	98,72	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERSENTASE		PD
			KINERJA	SATUAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGAR AN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.0.007.2.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	55	Orang	402.560.140	55	397.393.888	100	98,72	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	100	Persen	89.842.820	100	82.162.820	100	91,45	
1.06.1.06.0.007.2.01.03.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara	3	Lokasi	89.842.820	3	82.162.820	100	91,45	
1.06.1.06.0.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	3	Makam	62.962.820	3	62.962.820	100	100,00	
1.06.1.06.0.002.2.01.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	12	Laporan	26.880.000	12	19.200.000	100	71,43	
	JUMLAH		100		18.084.175.133		16.665.121.443	87,51	92,15	



Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial berdasarkan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2023 yang diimplementasikan melalui 6 Program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 18,084,175,133,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,665,121,443,- (92.15%) dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target anggaran Rp. 37.730.820,- dengan realisasi anggaran Rp. 28,880,820 (76.54%).
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 9.271.340,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.241.340,- (99.70%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%).
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 6.380.990,- dengan realisasi anggaran Rp6.280.990,- (98.43%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%).
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 4.675.010,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.575.010,- (97.90%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 dokumen (0%).
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 5.815.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.715.450,- (9,83%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%).
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja memiliki target anggaran Rp. 45.680.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 39.230.750,- (56.83%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 9 Laporan (85,89%).
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki target anggaran Rp. 4.020.390.933,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.796.491.728,- (94.43%) dan target kinerja sebesar 28 Orang dengan realisasi 28 Orang (100%).
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki target anggaran Rp. 7.953.310,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.953.310,-(100%) dan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen (100%).
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD memiliki target anggaran Rp. 9.180.200,- dengan realisasi anggaran

- Rp. 9.179.800,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi 12 dokumen (100%).
10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian memiliki target anggaran Rp. 30.718.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.718.800,- (100%) dan target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi 10 Dokumen (100%).
 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki target anggaran Rp. 72.089.670,- dengan realisasi anggaran Rp. 72.089.670,- (100%) dan target kinerja sebesar 1 Paket dengan realisasi 1 Paket (100%).
 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki target anggaran Rp. 80.160.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 80.160.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Paket dengan realisasi 12 Paket (100%).
 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki target anggaran Rp. 45.963.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.963.200,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Paket dengan realisasi 12 Dokumen (100%).
 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki target anggaran Rp. 9.624.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.624.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi 10 Dokumen (100%).
 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki target anggaran Rp. 201.336.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 201.336.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
 16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki target anggaran Rp. 41.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi 12 dokumen (100%).
 17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki target anggaran Rp. 133.308.970,- dengan realisasi anggaran Rp. 129.569.700,- (97,19%) dan target kinerja sebesar 4 Unit dengan realisasi 4 Unit (100%).
 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki target anggaran Rp. 113.691.440,- dengan realisasi anggaran Rp. 107.957.890,- (94,95%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
 19. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik memiliki target anggaran Rp. 46.873.980,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.776.613,- (89,12%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).

20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor memiliki target anggaran Rp. 14.140.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.140.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki target anggaran Rp. 471.960.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 468.798.000,- (99.33%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan memiliki target anggaran Rp. 262.122.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 261.286.800,- (99.70%) dan target kinerja sebesar 30 Unit dengan realisasi 30 Unit (100%).
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki target anggaran Rp. 237.928.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 237.213.408,- (99,70%) dan target kinerja sebesar 2 Unit dengan realisasi 2 Unit (100%).
24. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT memiliki target anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 34.025.000,-(97,21%) dan target kinerja sebesar 200 Keluarga dengan realisasi 200 Keluarga (100%).
25. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaen/Kota memiliki Rp. 109.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 108.039.000,- (98.26%), dan target kinerja sebesar 277 Orang dengan realisasi sebesar 277 Orang (100%).
26. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki Anggaran sebesar Rp. 49.591.440,- dengan realisasi anggaran Rp. 44.541.440,-(89.81) dan target kinerja sebesar 26 Orang dengan realisasi 26 Orang (100%).
27. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 1.333.454.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.321.946.600,- (99,14%) dan target kinerja sebesar 277 Lembaga dengan realisasi 277 Lembaga (100%).
28. Penyediaan Permakanan memiliki target anggaran Rp. 2.190.049.980,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.181.399.500,- (99.60%) dan target kinerja sebesar 16.007 Orang dengan realisasi 16.007 Orang (100%).

29. Penyediaan Sandang memiliki target anggaran Rp. 54.413.370,- dengan realisasi anggaran Rp. 54.413.370,- (100%) dan target kinerja sebesar 100 Orang dengan realisasi 100 Orang (100%).
30. Penyediaan Alat Bantu memiliki target anggaran Rp. 256.873.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 254.743.500,- (99.17%) dan target kinerja sebesar 450 Orang dengan realisasi 450 Orang (100%).
31. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga memiliki target anggaran Rp. 92.673.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 92.631.950,- (99.95%) dan target kinerja sebesar 150 Orang dengan realisasi 150 Orang (100%).
32. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan memiliki target anggaran Rp. 376.430.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 375.776.761,- (99.83%) dan target kinerja sebesar 4.448 Orang dengan realisasi 4.448 Orang (100%).
33. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial memiliki target anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 33.600.000,- (96%) dan target kinerja sebesar 30 Orang dengan realisasi 30 Orang (100%).
34. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA memiliki target anggaran Rp. 49.974.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 47.624.800,- (95.30%) dan target kinerja sebesar 30 Orang dengan realisasi 30 Orang (100%).
35. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 209.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 205.440.200,- (98.25%) dan target kinerja sebesar 129.417 Keluarga dengan realisasi 129.417 Keluarga (100%).
36. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga memiliki target anggaran Rp. 5.708.697.220,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.647.934.900,- (81.42%) dan target kinerja yaitu 135.000 Keluarga dengan realisasi 135.000 Keluarga (100%).
37. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki target anggaran Rp. 824.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 807.871.600,- (98.04%) dan target kinerja sebesar 54.562 Orang dengan realisasi 54.562 Orang (100%).

38. Penyediaan Makanan memiliki target anggaran Rp.358.568.950,- dengan realisasi anggaran Rp. 326.402.150,- (91,03%) dan target kinerja sebesar 400 Orang dengan realisasi 400 Orang (100%).
39. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana memiliki target anggaran Rp. 402.560.140,- dengan realisasi anggaran Rp. 397.393.888,- (98.71%) dan target kinerja sebesar 55 Orang dengan realisasi 55 Orang (100%).
40. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 62.962.820,- dengan realisasi anggaran Rp. 62.962.820,- (100%) dan target kinerja sebesar 3 Lokasi dengan realisasi 3 Lokasi (100%).
41. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 26.880.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.200.000,- (71.43%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).

3.7 Foto Dokumentasi Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

- Output : Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/kota (200 Keluarga)
- Outcome : Meningkatnya kapasitas keluarga pada KAT (200 Keluarga)



b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Output : Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (277 Orang)
- Outcome : Meningkatnya Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (277 Orang)



- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya (26 Orang)

Outcome : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (26 Orang)



- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina (277 Lembaga)

Outcome : Tersedianya Lembaga Masyarakat yang telah memperoleh pembinaan (277 Lembaga)



2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Output : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan (16.007 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis (16.007 Orang)

Dokumentasi Foto :



2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Output : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang (100 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Bantuan Sosial Sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis (100 Orang)

Dokumentasi Foto :



3) Sub Kegiatan Alat Bantu

Output : Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (450 Orang)

Outcome : Terpenuhiya Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (450 Orang)

Dokumentasi Foto :



4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Output : Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga (100 Persen)

Outcome : Terpenuhiya Pemberian Reunifikasi Keluarga (100 Persen)

Dokumentasi Foto :



b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1) Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan

Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (4.448 Orang)

Outcome : Terpenuhiya Pelayanan Pengaduan (4.448 Orang)

Dokumentasi Foto :



2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Output : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Orang)

Outcome : Meningkatnya Mental, spiritual dan fungsi sosial bagi peserta (30 Orang)

Dokumentasi Foto :



3) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Output : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (30 Orang)

Outcome : Meningkatnya wawasan dan pemahaman keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA(30 Orang)

Dokumentasi Foto :



3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (145.211 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin (145.211 Orang)

Dokumentasi Foto :



2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Output : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (54.562 KPM)

Outcome : Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (54.562 KPM)

Dokumentasi Foto :



3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Output : Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (460 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Bantuan Pengembangan Ekonomi bagi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (460 Orang)

Dokumentasi Foto :



4. Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Output : Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan (400 Orang)

Outcome : Terpenuhinya bantuan sosial permakananan bagi Korban bencana (400 Orang)

Dokumentasi Foto :



b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Output : Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (55 Orang)

Outcome : Terlaksanannya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (55 Orang)

Dokumentasi Foto :





5. Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Makam Pahlawan yang dilihara (3 Makam)

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (3 Makam)

Dokumentasi Foto :



2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan (3 Makam)

Outcome : Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan (3 Makam)

Dokumentasi Foto :



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 92.15% (baik).
- 2) Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian pada tahun 2023.
- 3) Capaian kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian kategori A.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Pemberian Bantuan Sosial harus merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif terhadap stakeholder terkait sehingga dalam penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih optimal;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Desember 2023
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Kepala



H. DIKDEK SADIKIN, A.K.S., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720515 199803 1 010

INSUM Medal

